

Judul : Program KPR FLPP, komisi XI inginkan PMN berkelanjutan
Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Program KPR FLPP Komisi XI Ingin PMN Berkelanjutan



Harris Turino

ANGGOTA Komisi XI DPR Harris Turino menyoroti keberlanjutan pendanaan program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Saat ini, KPR FLPP didukung Penyerahan Modal Negara (PMN) lewat PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) serta dana fiskal Pemerintah.

Harris menjelaskan, isu keberlanjutan wajib jadi perhatian serius karena Pemerintah menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus penggerak ekonomi dan kebutuhan rumah subsidi masih tinggi.

Di saat yang sama, berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) angka *backlog* perumahan nasional masih mencapai jutaan unit. "Apakah kemampuan fiskal ini bisa terus bertahan setiap tahun untuk menyubsidi bunga tetap lima persen di tengah permintaan yang terus melonjak?" katanya, Senin (22/6/2026).

Berikutnya, Harris menyoroti profil penerima manfaat FLPP yang sebagian besar berasal dari sektor informal. Kelompok ini memiliki tingkat kerentanan pendapatan lebih tinggi dibanding pekerja formal. Karena itu, perlu perhitungan cermat dalam penge-

lolaan risiko pembiayaan agar tetap berjalan stabil bagi seluruh pihak terkait.

Meskipun skema FLPP memberikan bunga tetap bagi debitur, lanjutnya, perubahan kondisi makroekonomi dan kenaikan suku bunga acuan bisa memengaruhi biaya pendanaan lembaga penyalur. Perlu upaya simulasi dan mitigasi, apakah tekanan biaya diserap perbankan atau membutuhkan tambahan subsidi dari Pemerintah dalam operasionalnya.

Kenaikan suku bunga, sambung Harris, berpotensi dibebankan kepada nasabah atau diserap sistem perbankan. Jika diserap, tentu membutuhkan biaya subsidi tambahan. "Itu harus dihitung cermat oleh SMF maupun Bank Tabungan Negara sebagai penyalur terbesar kredit rumah subsidi agar tidak membebani anggaran dan masyarakat," tegasnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menilai, PMN sebesar Rp 6,68 triliun kepada SMF berhasil memperluas akses KPR FLPP. Bantuan itu menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja sektor informal untuk memperkuat likuiditas pembiayaan perumahan yang disalurkan lewat 12 bank penyalur.

Dana yang disalurkan SMF, kata Fauzi, berkontribusi sekitar 25 persen dari total pembiayaan rumah subsidi melalui skema KPR FLPP. Makanya, dukungan itu merupakan bagian dari upaya mendukung target pembangunan tiga juta rumah yang saat ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Komisi XI DPR, lanjutnya, juga mendapati efektivitas penyaluran pembiayaan kepada kelompok pekerja informal yang kerap menghadapi kendala mengakses kredit perbankan. ■ PYB